

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1068/PID.B/2014/PN.JKT.SEL)**

Wandra Saputra

121 0612 009

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas hingga bawah banyak terjadi penyimpangan hukum, pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Pencurian, misalnya yang diatur dalam bab XXII buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentukan Undang-Undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena Undang-Undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja. Dewasa ini banyak sekali terdapat kasus percobaan yang terjadi di masyarakat kita, baik kasus percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, sampai percobaan pemerkosaan terjadi. Masyarakat seringkali keliru dalam mengartikan apa itu percobaan. Dalam kenyataannya, masyarakat masih memiliki tanda tanya besar mengapa percobaan harus dipidana. Padahal, tindak pidana yang dimaksud tidak sempat terjadi. Penelitian ini dengan menggunakan data kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti

Kata kunci: Penegakan Hukum, pencurian, percobaan

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGENTS OF THEFT
(CASE STUDY DECISION NUMBER 1068/PID.B/2014/PN.JKT.SEL)

Wandra Saputra

121 0612 009

Various cases spread in line with the demands for change, which is known by the reform, it appears in various levels of society from the heads to the many irregularities of law, civil society development law (civil society) is a way of life of people with adherence to the values of law. Theft, for example, set forth in Chapter XXII Criminal Code book II is the crime of theft in the form of staple containing all the elements of the crime of theft. So that a person can be convicted of committing criminal offenses of theft, the person must prove to have complied with all the elements of the crime of theft contained in the provisions of Article 362 Penal Code. Although the establishment of the Act does not state unequivocally that the crime of theft as referred to in Article 362 Penal Code should be done on purpose, but the indisputable truth that the crime of theft must be done intentionally, that is because the Act our criminal applicable not recognized institute criminal acts of theft committed by mistake. These days there are lots of cases of trials that occur in our society, a good case of attempted theft, attempted murder, attempted rape to occur. People are often mistaken in interpreting what the trial. In fact, the community still has a big question mark why the trial should be punished. In fact, the criminal offense in question had not occurred. This study using literature data that is normative is done by researching library materials or secondary materials are collected and analyzed and scrutinized.

Keywords: Law Enforcement, theft, probation